

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METERAI ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN CPNS 2024 DI KOTA PADANG

Aliyah Sahra Silvandi¹, Afriva Khaidir²

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

sahraaliyah06@gmail.com¹, af.khaidir@fis.unp.ac.id²

Abstract

This research is motivated by the development of electronic stamps that have begun to be used by the government in the electronic document administration process, one of which is in CPNS registration. This study aims to understand the implementation of the use of electronic stamps in the 2024 CPNS registration in Padang City, and what factors influence the implementation of the use of electronic stamps in the 2024 CPNS registration in Padang City. The method used in this study is a qualitative method through a descriptive approach. Data collection in the study uses interviews and documentation studies. This study shows that the Implementation of the Use of Electronic Stamps in the 2024 CPNS Registration in Padang City has been running quite well, but has not been fully optimal based on the theory of George C. Edward III seen through communication indicators, data sources, dispositions, and bureaucratic structures. This study also shows the existence of internal and external factors that influence the implementation of the use of electronic stamps in the 2024 CPNS registration in Padang City, namely (1) internal factors, the adaptive attitude of the Padang City regional selection committee in responding to variations in the use of stamps in CPNS administrative documents. (2) external factors, in the form of PERURI's unpreparedness for the e-stamp system and the existence of registration administration procedures that do not fully support digitalization.

Keywords: Policy Implementation, Electronic Stamps, CPNS Registration

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan meterai dalam bentuk elektronik yang mulai digunakan pemerintah dalam proses administrasi dokumen elektronik salah satunya pada pendaftaran CPNS. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang, dan apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penggunaan Meterai Elektronik dalam Pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal berdasarkan teori George C. Edward III dilihat melalui indikator komunikasi, sumber data, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini juga menunjukkan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang yaitu (1) faktor internal, Sikap adaptif panitia seleksi daerah Kota Padang dalam menyikapi adanya variasi penggunaan meterai pada dokumen administrasi CPNS. (2) faktor eksternal, berupa ketidaksiapan sistem e-meterai oleh PERURI dan adanya prosedur administrasi pendaftaran yang belum sepenuhnya mendukung digitalisasi.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Meterai Elektronik, Pendaftaran CPNS

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang, mendorong perubahan mendasar pada cara pemerintah mengelolah administrasi dan memberikan layanan kepada masyarakat yang biasa dikenal dengan pemerintah berbasis digital Atau *Electronic Government*. Melalui *e-government* berbagai layanan pemerintah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat diakses secara digital sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan adanya meterai elektronik sebagai salah satu upaya digitalisasi terkait sistem administrasi perpajakan oleh pemerintah melalui pengenaan bea meterai atas dokumen yang sebelumnya berbasis kertas (*paper-based agreement*) menjadi lebih efisien yang mendukung berkurangnya penggunaan kertas (*paperless*) (Wibowo, 2025).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2021 yang membahas tentang pengadaan, pengelolaan dan penjualan Meterai pada pasal 1 menyatakan bahwa, meterai elektronik merupakan meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen elektronik di sistem tertentu. Dengan adanya e-Meterai, secara resmi dokumen elektronik diakui sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan hukum dan setara dengan dokumen fisik yang masih menggunakan meterai konvensional. Hal ini berarti dokumen yang telah ditempel atau di bubuhkan e-meterai dianggap sah dan dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai (Wiryawan, 2022).

Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) juga telah beralih ke sistem elektronik. Proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melibatkan berbagai tahapan administratif yang memerlukan validasi dokumen, seperti surat pernyataan, ijazah, dan dokumen pendukung lainnya. Kebijakan penggunaan e-meterai awalnya merujuk pada Surat Edaran Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2021 tentang penggunaan meterai pada penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa dokumen persyaratan seperti surat lamaran dan surat pernyataan harus dibubuhi materai yang sah. Meskipun dalam surat edaran tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai penggunaan meterai elektronik (e-meterai), penerapan kebijakan ini diperkuat melalui sistem SSCASN BKN, di mana tersedia pengumuman petunjuk teknis penggunaan meterai dan pembubuhan e-meterai. Dukungan ini sejalan dengan ketentuan dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia selaku pihak yang berwenang menerbitkan dan mengelola e-meterai, sebagaimana tertuang dalam Siaran Pers Nomor 26/SP-PERURI/VII/2024 mengenai website resmi pembelian e-meterai bagi CPNS 2024 yaitu <https://meterai-elektronik.com/> (peruri.co.id, 19 agustus 2024).

Implementasi penggunaan e-meterai dalam pendaftaran dokumen administrasi CPNS 2024 mengalami beberapa permasalahan signifikan. Pada tahun 2024 merupakan periode pertama penggunaan e-meterai dalam proses pendaftaran CPNS di Kota Padang, menggantikan meterai konvensional yang sebelumnya digunakan pada seleksi CPNS terakhir di tahun 2021. Berdasarkan pengumuman Nomor. 870. 526/BKPSDM

.PDG/2024, pemerintahan Kota Padang membuka kesempatan bagi warga Negara Republik Indonesia yang memiliki keinginan dan memenuhi syarat sebagai calon pegawai Negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah Kota Padang dengan penetapan kebutuhan sebanyak 492 formasi yang terdiri dari 428 formasi untuk tenaga teknis dan 64 formasi untuk tenaga kesehatan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi e-meterai adalah sistem e-meterai nasional yang dikelola oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PERURI sering mengalami gangguan teknis. Gangguan tersebut menyebabkan keterbatasan akses para pelamar untuk masuk laman website maupun pada proses pembeli e-meterai sehingga menghambat proses pendaftaran secara signifikan, baik di tingkat Nasional maupun di wilayah Kota Padang. Berdasarkan data BKN pada tanggal 4 September 2024, dari total 2.718.663 pelamar secara nasional, hanya 954.581 pelamar yang berhasil menyelesaikan pendaftaran. Situasi serupa juga dialami di Kota Padang. Data UPT BKN Padang pada tanggal 4 September 2024 menunjukkan dari total 9.123 pelamar, hanya 2.935 pelamar yang berhasil submit pendaftaran. Rendahnya jumlah pelamar yang berhasil menyelesaikan pendaftaran menunjukkan bahwa infrastruktur digital belum mampu menangani tingginya kunjungan penggunaan situs e-meterai pada periode yang bersamaan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pegawai UPT BKN Padang dan pelamar CPNS, ditemukan rendahnya kesadaran para pelamar untuk mendaftar di awal periode

pendaftaran. Meskipun BKN telah membuka pendaftaran sejak 20 Agustus 2024, sebagian besar pelamar baru melakukan proses pendaftaran mendekati batas waktu. Sebagaimana data BKPSDM Kota Padang hingga enam hari setelah pengumuman resmi pembuka pendaftaran CPNS 2024, jumlah pelamar yang melakukan submit pendaftaran belum mencapai 100 orang pelamar lebih tepatnya baru 86 orang pelamar yang melakukan submit pendaftaran. Kebiasaan para pelamar melakukan pendaftaran di akhir penutupan mengakibatkan terjadinya lonjakan traffic pada situs website yang disediakan pemerintah. Di tengah kesulitan mengakses sistem resmi, muncul website e-meterai yang belum jelas kemitraannya dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) dan platform e-commerce seperti shopee dan tokopedia yang dimanfaatkan para calo menjual e-meterai.

Mengacu pemaparan masalah pada latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tentang implementasi penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang yang dilihat melalui teori implementasi kebijakan George, C. Edward dan apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti akan mendeskripsikan, mencatat, dan mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan data dokumentasi sehingga dapat

memaparkan Implementasi Penggunaan Meterai Elektronik dalam Pendaftaran CPNS 2024 Di Kota Padang. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti Implementasi Penggunaan Meterai Elektronik dalam Pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan model George C. Edward III dimana terdiri dari beberapa indikator penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Wawancara dan studi dokumentasi sangat berperan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling dalam pemilihan informan*. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Triangulasi sumber juga berperan sebagai teknik keabsahan data penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meterai elektronik (e-meterai) diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menerapkan undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, yang berisikan bahwa bea meterai tidak hanya dikenakan pada dokumen fisik, tetapi juga pada dokumen yang bersifat elektronik. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negera RI dengan menghadirkan situs resmi e-meterai melalui laman <https://meterai-elektronik.com/>. Kehadiran website ini bertujuan untuk mempermudah peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara dalam proses pembelian dan penggunaan e-meterai pada dokumen administrasi pendaftaran. Implementasi e-meterai dalam proses pendaftaran CPNS ini tidak hanya

mendorong terwujudnya sistem administrasi yang lebih efisien tetapi juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dokumen fisik (peruri.co.id, 2024).

Berdasarkan temuan pada penelitian dapat dipahami bahwa mekanisme penggunaan meterai dalam pendaftaran CPNS belum sepenuhnya mendukung penerapan digitalisasi dokumen secara optimal. Proses yang dijalankan para pelamar masih melibatkan tahapan manual, seperti mencetak dokumen, menandatangani secara manual dengan tinta hitam, kemudian memindai kembali dokumen fisik tersebut kedalam format PDF sebelum dilakukan pembubuhan e-meterai secara online. Idealnya, Dokumen elektronik harus dibuat, ditandatangani dan divalidasi seluruhnya dalam bentuk digital sehingga menciptakan proses administrasi yang efisien, cepat, dan bebas dari penggunaan kertas (paperless). Ketika pelamar harus mencetak dan menandatangani dokumen secara manual, maka tujuan utama digitalisasi yakni efisiensi, kemudahan, dan pengurangan ketergantungan pada dokumen fisik belum tercapai. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Feiti Kalesaran (2022), ia menyatakan dengan menggunakan meterai elektronik pembuatan dokumen elektronik tidak perlu dicetak kembali untuk dibubuhi meterai.

Analisis mengenai implementasi penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward, 1980 (dalam Joko Purnomo, 2020), yang menunjuk pada empat indikator yang memiliki peranan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu:

a) Komunikasi

Menurut George Edward III, terdapat tiga aspek utama yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi (penyampaian informasi), clarity (kejelasan informasi), dan konsistensi komunikasi (Ningrum, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan studi dokumentasi peneliti, diketahui bahwa penyampaian informasi mengenai kewajiban penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS Tahun 2024 di Kota Padang telah dilakukan melalui daluran resmi, seperti media social BKN, buku panduan pendaftaran SSCASN. Selain itu BKPSDM Kota Padang turut mempertegas ketentuan tersebut melalui pengumuman dengan nomor 870.524/BKPSDM.PDG/2024 yang menjelaskan tentang pengadaan CPNS Pemerintah Kota Padang tahun 2024. Proses transmisi informasi tersebut secara umum telah berjalan optimal, namun masih ditemukan tidak terdapat penjelasan rinci terkait ketentuan teknis dokumen elektronik sebelum dibubuhkan meterai. Kondisi ini berdampak pada munculnya variasi praktik di lapangan seperti adanya pelamar yang menggunakan meterai elektronik hanya sebagai pengganti meterai tempel tanpa diiringi proses elektronik seluruhnya (semi manual), lalu ada pelamar yang memang memahami tujuan penggunaan meterai elektronik untuk dokumen elektronik sehingga seluruh prosesnya online dan ada pula pelamar yang masih menggunakan meterai konvensional.

Selain itu, konsistensi komunikasi antar instansi cukup baik, ketika terjadi gangguan sistem e-meterai pada PERURI, BKN merespon dengan cepat melalui penerbitan surat edaran pada tanggal 5 september 2024 yaitu Surat Kepala BKN nomor 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 perihal penyesuaian jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 serta Surat Deputi BKN nomor 5915/B.SI.02.03/SD/K/2024 perihal

penggunaan meterai pada pendaftaran CPNS tahun 2024. Sebagai tindak lanjut, tersebut BKPSDM Kota Padang juga mengeluarkan pengumuman nomor 800.1.2.2/685/BU-PDG/2024 tentang perpanjangan jadwal pendaftaran seleksi CPNS Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi antar Pemerintah Pusat dan Daerah telah berjalan cukup konsisten. Informasi yang disampaikan tanpa perubahan makna informasi dari pusat. Febriansyah (2022) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa konsistensi dalam penyampaian pesan dari pimpinan kepada anggota di bawahnya telah dilaksanakan. Dalam menyampaikan informasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah menjadi tanda bahwa pimpinan dalam menjalankan kebijakan sudah sesuai dengan peraturan.

b) Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu hal terpenting dalam melaksanakan implementasi secara optimal. Dengan tidak adanya sumber daya maka dapat dipastikan kebijakan yang dibuat tidak akan mencapai tujuannya. Sumber daya mencakup aspek sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasaran (Febriansyah,2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan studi dokumentasi peneliti, diketahui bahwa dilihat dari indikator sumber daya dari sisi sumber daya manusia yaitu peran BKPSDM kota Padang dalam pelaksanaan pengadaan CPNS 2024 membentuk panitia seleksi daerah yang terdiri dari seluruh jumlah pegawai BKPSDM Kota Padang ikut serta dalam penyeleksian dokumen pendaftaran administrasi CPNS yaitu berjumlah 67 orang. Meskipun sistem e-meterai telah terintegrasi secara komputerisasi dalam portal pendaftaran SSCASN, namun panitia seleksi tetap melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen pelamar yang diunggah

di SSCASN melalui SIASN untuk memastikan keabsahan meterai, terutama karena penggunaan meterai pada CPNS 2024 tidak semua pelamar memakai meterai elektronik dan ada pelamar yang memakai meterai tempel konvensional.

Sumber daya dilihat dari sisi informasi dan kewenangan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga penyelenggara utama rekrutmen CPNS menyediakan sumber daya informasi melalui laman resmi SSCASN, media social, dan menyediakan situs pengaduan bagi pelamar yang memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut terkait pengguna meterai elektronik dalam proses pendaftaran CPNS 2024, dapat menghubungi helpdesk melalui <https://helpdesk-sscasn.bkn.g.id/> (Tim Sasper Peruri, 2024).

c) Disposisi

Kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai tujuannya disebut dengan Disposisi (Azizah & Prabawati, 2021). Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan studi dokumentasi, bahwa indikator disposisi pada Implementasi Penggunaan Meterai Elektronik dalam Pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang secara umum menunjukkan respon yang cukup positif. Dilihat dari pihak UPT.BKN Kota Padang sebagai instansi vertikal yang mewakili pemerintah pusat di tingkat daerah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung kebijakan penggunaan meterai elektronik. Hal ini mencerminkan sikap responsif dalam menyebarkan informasi resmi dari BKN pusat melalui media sosialnya yaitu @uptbknpadang, sehingga kebijakan dapat diketahui dan dipahami secara luas oleh pelamar CPNS. Sementara itu, dari pihak BKPSDM Kota Padang sebagai pelaksana pengadaan CPNS ditingkat daerah dilihat dari disposisi panitia

seleksi daerah yang menunjukkan tanggung jawab dalam melakukan penyesuaian pemeriksaan dokumen yang menggunakan meterai elektronik dan pemeriksaan dokumen yang masih memakai meterai tempel konvensional. Hal ini memperlihatkan adanya komitmen adaptif, dimana pelaksana berusaha menjalankan kebijakan sesuai pedoman meskipun dihadapkan pada perbedaan teknis dilapangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hafiz Haikal (2025) menjelaskan sikap positif akan terbentuk jika kebijakan dinilai rasional, logis, dan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat. Sikap ini akan tercermin dengan semangat, dedikasi, dan keterbukaan komunikasi pelaksana dalam menghadapi tantangan teknis maupun sosial.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu susunan organisasi di dalam ruang lingkup birokrasi pelaksana kebijakan (Azizah & Prabawati, 2021). Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan studi dokumentasi, bahwa indikator struktur birokrasi pada implementasi penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang melibatkan Badan Kepegawaian Negara sebagai pembuat kebijakan dalam pengadaan CPNS Nasional yang dikoordinasikan melalui UPT.BKN kota padang, serta berkoordinasi juga dengan BKPSDM Kota Padang sebagai pelaksana pengadaan CPNS ditingkat daerah. Struktur koordinasi ini bersifat vertical dan terintegrasi, dimana setiap kebijakan, surat edaran, maupun petunjuk teknis dari BKN pusat diteruskan secara sistematis kepada UPT.BKN Kota Padang dan BKPSDM Kota Padang selaku panitia seleksi daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang.

Secara umum penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS belum ada SOP khususnya, hanya tertuang dalam

Surat Edaran BKN Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Meterai Pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Hal ini sejalan dengan penelitian Febriansyah (2022) dalam kebijakan satu data dinyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur atau SOP dalam proses pembuatan kebijakan masih belum tersedia, namun kebijakan tersebut masih dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang satu data Sumatera Selatan. Namun dalam pelaksanaan seleksi administrasi pendaftaran CPNS, pembagian tugas panitia seleksi daerah kota padang telah berjalan sesuai *Standar Operasional Procedure* (SOP) nomor 060.615.d/bkpsdm-pdg/2021 serta hasil rapat koordinasi yang secara rutin dilakukan setiap kali proses pengadaan CPNS berlangsung.

Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Meterai Elektronik dalam Pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang.

1) Faktor Internal

Sikap adaptif panitia seleksi daerah Kota Padang dalam menyikapi adanya variasi penggunaan meterai pada dokumen administrasi CPNS. Sikap adaptif yang dilakukan oleh panitia seleksi daerah Kota Padang terhadap adanya variasi penggunaan meterai dalam pendaftaran CPNS 2024 merupakan salah satu internal yang mempengaruhi kebijakan penggunaan meterai elektronik. Menurut Rachmat Bahmim Safitri (2022), Perilaku adaptif merupakan kemampuan sosial dan individual seseorang untuk menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya, yang diukur dengan menggunakan skala perilaku adaptif yaitu meliputi aspek communication, occupation, self direction,

socialization, dan locomotion. Meskipun sistem verifikasi keaslian meterai elektronik telah otomatis komputerisasi dalam sistem pusat SSCASN saat palamar mendaftar, panitia seleksi ditingkat daerah tetap melakukan koordinasi dan pengecekan ulang terhadap dokumen pelamar sebab dimana sebagian pelamar masih menggunakan meterai konvensional. Inisiatif ini menunjukkan adanya disposisi positif pelaksana kebijakan dalam menjaga kelancaran proses seleksi administrasi CPNS di tingkat daerah.

2) Faktor Eksternal.

Faktor eksternal diantaranya; *pertama*, Ketidaksiapan PERURI dalam menyediakan sistem e-meterai. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi implementasi penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang adalah ketidaksiapan sistem e-meterai yang di sediakan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI). Saat priode pendaftaran CPNS 2024, terjadi gangguan teknis pada situs e-meterai sehingga akses para palamar menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi menjadi dasar layanan digital belum sepenuhnya memadai mendukung kebutuhan pendaftaran secara massal. Hal ini didukung oleh penelitian Jesica Cally Gabriella,dkk (2024) yang menyatakan perlunya perum peruri mengoptimalkan infrastruktur teknologi dengan memperkuat kapasitas server dan jaringan. Hal ini penting agar layanan e-meterai mampu menangani lonjakan pengguna yang signifikan, terutama

mendekati masa tenggat pendaftaran.

Kedua, Adanya prosedur administrasi pendaftaran yang belum sepenuhnya mendukung proses digitalisasi. Prosedur administrasi pendaftaran yang belum sepenuhnya mendukung proses digitalisasi menjadi salah satu faktor juga dalam mempengaruhi implementasi penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang. Meterai elektronik dirancang untuk memfasilitasi proses pengesahan dokumen elektronik (Tanjung, 2023). Namun pada praktiknya pelamar tetap diwajibkan mencetak surat lamaran dan surat pernyataan, menandatangani secara manual dengan tinta hitam, kemudian memindainya kembali kedalam bentuk format elektronik untuk selanjutnya dibubuhkan e-meterai. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan keamanan dan keabsahan identitas pelamar, sebab penggunaan tanda tangan elektronik belum diimplementasikan dalam proses administrasi dokumen elektronik. Dengan demikian, alur administrasi yang diterapkan masih bertumpu pada praktik konvensional (*paper-based*).

KESIMPULAN

Implementasi Penggunaan Meterai Elektronik Dalam Pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Dari keempat indikator implementasi kebijakan George C. Edward III, dapat disimpulkan yaitu dari segi

komunikasi, informasi mengenai kewajiban penggunaan meterai elektronik telah disampaikan secara luas melalui situs resmi BKN, media sosial, dan Buku panduan SSCASN, serta disebarluaskan oleh UPT.BKN kota Padang dan BKPSDM Kota Padang. Namun Penjelasan teknis terkait dokumen elektronik surat lamaran dan surat pernyataan sebelum dibubuhkan meterai belum sepenuhnya tertulis dengan penjelasan rinci, sehingga muncul berbagai variasi pemahaman dalam pelaksanaan dokumen pendaftaran. Kemudian *Sumber Daya*, kesediaan sumber daya manusia, informasi, dan kewenangan secara umum mendukung implementasi. *Disposisi*, secara umum sudah menunjukkan respon yang cukup positif antara pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan CPNS. Sedangkan *struktur birokrasi*, adanya koordinasi vertical antara BKN pusat sebagai pembuat kebijakan, UPT.BKN Kota Padang dan BKPSDM kota Padang sebagai pelaksana pengadaan CPNS di tingkat Daerah.

Faktor yang mempengaruhi implementasi penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang, ditemukan adanya faktor internal yakni Sikap adaptif panitia seleksi daerah Kota Padang dalam menyikapi adanya variasi penggunaan meterai pada dokumen administrasi CPNS. Sementara itu, adanya faktor eksternal yang mencakup ketidaksiapan PERURI dalam menyediakan sistem e-meterai serta prosedur administrasi pendaftaran yang belum sepenuhnya mendukung proses digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Azizah, E. S., & Silviana, A. (2024). Efektivitas Penggunaan Meterai Elektronik Pada Akta Notaris Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. *Jurnal Hukum Ekselen*, 6(2).
- Azizah, A. N., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. *Publika*, 459-474
- Daruhadi, Gagah, & Sopiati, Pia. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *Jurnal Cendikia Ilmiah*, 3(5).
- Febriansyah, F. M. (2022). Implementasi kebijakan satu data dalam menyediakan basis data yang akurat dan transparan di provinsi sumatera selatan (studi pada dinas komunikasi dan informasi provinsi sumatera barat). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sriwijaya*
- Gabriella, J. C., Dkk. (2024). Kajian Yuridis Landasan Solusi Dan Penerapan E-Materai Pada Prosedur Pendaftaran CPNS. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(3).
- Haikal, H. (2025). Implementasi Kebijakan Satu Kartu Keluarga Satu Batu Bata Di Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang. *Institute Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Hasanah, R. K. (2024). Penerapan Teknologi pada Sumber Daya Manusia dalam Proses Seleksi Penerimaan Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Internasional Pendidikan Dan Sosial*, 6(2).
- Hasanah, U., Husna, H., & Haris, M. (2024). Keabsahan Meterai Elektronik Pada Akta Otentik Di Notaris. *Jurnal Hukum Dan Sosial*, 2(1).
- Kalesaran, F. V. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. *Jurnal Unsrat*.
- Kertanegara, R., dkk. (2025). Evaluasi Strategi Komunikasi Krisis PERURI Dalam Kasus E-Meterai Tahun 2024 Berdasarkan Situational Crisis Communication Theory. *Jurnal Senako*, 2(1).
- Safitri B. R (2022). Pelatihan Penerapan Perilaku Adaptf PNS dalam Menghadapi Era Globalisasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Tanjung, M. S. (2023). Kegunaan E-Meterai Dalam Dokumen Elektronik Dan Implementasi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2).
- Wibowo, K. Z., & Hartanto, G. (2025). Implikasi penggunaan e-meterai terhadap kekuatan mengikat dalam pembuktian perjanjian elektronik. *Jurnal Hukum Sehasem*, 11(1).

Buku

- Hasan, H., dkk. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif. Sumatera Barat*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Khairudin, Soewiro, & Aminah. (2021). *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*. Jawa Tengah: Amerta Media.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.

Buku Petunjuk Pendaftaran Calon ASN Tahun 2024

Skripsi

- Maulan, Akbar. 2023. Implementasi Elektronik Government “Siap Kerja” Pada Upt Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Ningrum, Vidya Marselia. 2022. Implementasi Kebijakan E-Government Pada Pelayanan

Perizinan Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Yulistiani, Indriati. 2024. Implementasi Smart Kampung Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sinjai. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar.

Dokumen Resmi :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penjualan Meterai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 133 /PMK.03/2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penjualan Meterai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Surat Edaran BKN Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Meterai Pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

Pengumuman BKPSDM Kota Padang Nomor.870.526/BKPSDM.PDG/2024

tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024.

Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

RPJPD Kota Padang Tahun 2005-2025.

Website

Tim Sasper PERURI (2024). Siaran Pers nomor 26/PR-PERURI/VIII/2024

<https://www.peruri.co.id/press-release/peruri-hadirkan-website-resmi-pembelian-e-meterai-bagi-casn-2024>

Tim Sasper PERURI (2024). Siaran Pers nomor 24/PR-PERURI/IX/2024.

<https://www.peruri.co.id/press-release/layanan-e-meterai-pada-website-meterai-elektronikcom-sudah-dapat-diakses-kembali>